

# ASPEK HUMAN RELATION DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERENCANAAN KOTA

## Sebuah Gagasan untuk Implementasi Perencanaan Kota di Era Perubahan

Makalah

Disampaikan dalam Seminar Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Perubahan Multidimensi

Departemen Teknik Planologi FTSP ITB

Desember 2004

Oleh

*Agus S. Ekomadyo*

Departemen Teknik Arsitektur FTSP ITB

---

### **Abstrak:**

*“Yang tetap di dunia saat ini hanyalah perubahan”, ungkap Tom Peters, pakar manajemen dunia. Perubahan menjadikan kita hidup di tengah revolusi yang mengubah cara kita hidup, berkomunikasi, berpikir, dan mencapai kesejahteraan, ungkap pakar yang lain. Era perubahan ini (the Age of Change) bisa dipicu oleh banyak hal: perkembangan informasi dan telekomunikasi, globalisasi, bangkitnya perusahaan multinasional, munculnya semangat persaingan usaha, dan banyak hal lain yang saling tumpang tindih dengan implikasi yang jelas pada cara hidup kita: perubahan. Perubahan ini menjadikan manusia berlomba-lomba berinovasi dan berkreasi untuk terus bertahan hidup dan meniti tangga menuju sukses. Maka pengambilan keputusan yang cepat oleh individu inovatif menjadi lebih cocok untuk era ini daripada adaptasi masalah oleh sistem ala organisasi terstruktur.*

*Perubahan ini berimbas pada banyak bidang, termasuk perencanaan kota. Jika di era 1960-an, masa kejayaan Modernisme, proses perencanaan lebih banyak merupakan proses turunan scientific, maka tahun 1990-an, setelah pudarnya pengaruh Modernisme, proses perencanaan lebih berorientasi kepada keterlibatan dan partisipasi. Dalam banyak kasus banyak produk-produk perencanaan yang gagal, sekaligus juga menjadi simbol kegagalan modernisme di banyak hal. Misalnya, ketika sebuah lingkungan binaan yang tercipta tidak mau dihidupi oleh warganya (tidak ditinggali, warga tidak mau menempati), karena tidak terciptanya “sense of belonging” terhadap tempat baru itu. Akhir abad ke-20, seperti diungkap oleh Megatrends 2000, bahwa akan muncul era kejayaan individu, dimana individu-individu akan semakin menentukan. Bahkan dalam konsep bisnis, semakin hari semakin menguat konsep pemasaran yang mendekati ke konsumen secara semakin personal (consumer inside), melihat konsumen bukan sekadar populasi tetapi juga kumpulan pribadi yang masing-masing mempunyai mau.*

*Apa kaitannya dengan proses pengambilan keputusan perencanaan kota? Jika kita merencanakan sesuatu untuk diri kita sendiri, dan kita memutuskan untuk melaksanakan rencana itu betapapun itu membuat kita sulit, kita akan menjalankannya dengan motivasi bahwa rencana itu akan menjadikan kita lebih baik. Namun manakala kita membuat rencana yang akan dilaksanakan oleh pihak lain, maka tidak ada jaminan pihak lain itu akan melaksanakan rencana yang kita buat, sebagus apapun rencana itu, jika mereka tidak menganggap rencana itu signifikan atau membuat kehidupan mereka lebih baik, apa lagi rencana itu akan banyak menyulitkan atau merepotkan mereka. Dan perbedaan persepsi ini menjadi semakin dimungkinkan terutama dengan semakin banyaknya informasi.*

*Sebuah perencanaan memang bertugas untuk membangun sebuah sistem. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi sampai sekarang telah menghasilkan banyak alternatif sistem yang dihasilkan dari berbagai pemikiran dari berbagai kalangan. Maka, sudah bukan saatnya lagi perencana hanya berupaya menerapkan sebuah sistem yang dianggap bagus pada suatu kondisi, tetapi lebih tepat rasanya adalah mencari atau mengadaptasi suatu sistem agar cocok dilaksanakan di suatu kondisi. Selain pengetahuan dan pemahaman terhadap sebuah sistem, termasuk kondisi ideal yang diinginkan, sebuah*

proses perencanaan juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman akan kondisi yang ada. Dan kondisi ini bisa menjadi suatu variabel yang tidak pasti, sulit diteorikan, terutama jika menyangkut manusia-manusia pelaku atau yang terlibat dalam perencanaan dan penerapan suatu rencana. Pepatah kita mengatakan "Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu".

Dari sinilah, pendekatan yang bersifat "human relation" menjadi perlu, terutama untuk menghadapi kejadian yang tidak pasti akibat dinamika oleh orang-orang yang terlibat. Pendekatan "human relation" mengharuskan adanya sikap "empati" dalam memahami persoalan: memahami manusia sebagai individu yang punya mau. Sebuah ungkapan tesauf menyebutkan ungkapan "Aku merasakan apa yang kau ketahui" yang mempunyai derajat keilmuan lebih tinggi daripada ungkapan "Aku mengetahui apa yang kau rasakan", bisa memberikan gambaran bagaimana empati sangat berperan di sini. Dan dalam proses perencanaan kota, hal ini berarti kita perlu memahami dan isi kepala dan isi hati para pelaku pembangunan dan pengelolaan kota, baik dari kalangan birokrasi, pengembang, atau masyarakat pengguna, lebih daripada memahami isi kepala kita walau segudang teori-teori yang rumit ada di dalamnya.

Dalam upaya mewujudkan "Good Governance", antara lain lewat prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka proses perencanaan pembangunan kota harus disosialisasikan ke masyarakat. Pemahaman terhadap isi kepala dan isi hati para pelaku menjadi penting, agar sosialisasi itu bukan menjadi penyampaian informasi satu arah. Seharusnya, sosialisasi berujung pada tergerakannya hati para pelaku untuk melakukan tindakan atau perubahan sesuai yang diamanatkan dalam perencanaan. Kita bisa belajar dari para pendahulu kita, seperti Bung Karno dan Bung Tomo, yang pidatonya sanggup membakar hati dan menggerakkan rakyat untuk bergerak, berperang melawan musuh, betapapun beratnya, karena keduanya sanggup "mengerti apa yang rakyat Indonesia inginkan", yaitu hidup merdeka. Atau kita juga bisa belajar dari dunia bisnis, tentang prinsip kesuksesan menjual ide atau gagasan kepada orang lain, yaitu "to understand before you want to be understood".

Dengan pendekatan "human relation", suatu sistem terbuka tidak hanya sekadar memahami para pelaku secara institusional (Stakeholders mapping), tetapi lebih jauh sampai kepada pemahaman pada individu "pemain kunci" (Key actors mapping). Jika orang-orang yang mempunyai kekuatan menggerakkan mempunyai satu ide yang sama dan sekuat untuk membuat suatu perubahan atau tindakan menuju arah yang lebih baik, maka apa yang dicita-citakan atau direncanakan relatif akan bisa terwujud. Dan jika pihak lain melihat ini ternyata bisa menjadi teladan atau preseden yang baik, tanpa diperintah pun mereka akan mengikuti dengan sendirinya. Hal ini menjadi lebih realistis untuk masa transisi, daripada sekadar berpikir muluk-muluk merencanakan keadaan yang ideal tetapi gagal untuk menggerakkan orang menuju keadaan yang ideal itu. Disini keteladanan menjadi lebih nyata daripada sekadar penerapan atau pemaksaan aturan.

## **ERA PERUBAHAN DAN KEJAYAAAN INDIVIDU**

"Yang tetap di dunia saat ini hanyalah perubahan", ungkap Tom Peters, pakar manajemen dunia. "Perubahan menjadikan kita hidup di tengah revolusi yang mengubah cara kita hidup, berkomunikasi, berpikir, dan mencapai kesejahteraan", ungkap Gordon Dryden dan Jeanette Vos. Kalau ditengarai dengan cermat, sejak kita menerima Globalisasi dan Era Informasi sebagai bagian hidup kita, kita segera bergelut dengan perubahan tata nilai di banyak hal. Dalam politik kenegaraan, konsep Negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat (Welfare State) tiba-tiba mulai dirasakan tidak relevan lagi, dan berharap munculnya sektor swasta dalam pelayanan publik. Dalam ekonomi bisnis, orientasi bisnis yang didominasi perusahaan besar tiba-tiba menjadi ketinggalan zaman, beralih ke perusahaan kecil, atau individu yang inovatif (a *global paradox*). Dalam pendidikan, pendidikan yang dibayangkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, di lapangan malah menuai banyak ketidaksesuaian, dibanding dengan pendidikan berbasis bisnis yang semula dianggap tabu. Dalam gaya hidup, dulu kalangan "gaul" dianggap perilaku menyimpang dari masyarakat, kini malah dianggap sebagai salah satu alat efektif dalam menjalin relasi dan prasyarat untuk sukses.

Mengapa banyak hal tak terduga bisa terjadi di era globalisasi dan informasi ini? Penjelasan sederhana berikut mungkin bisa sedikit membantu. Sebutlah pemicunya adalah globalisasi, semangat manusia untuk saling mengenal manusia lain tanpa batas negara dan geografis. Lalu dikembangkanlah teknologi informasi, dan manusia bisa saling berkomunikasi dari berbagai belahan bumi. Informasi pun cepat digapai dari satu pemikiran ke pemikiran lain. Dengan *backup* informasi yang ada, manusia menjadi lebih percaya diri untuk menjadi diri sendiri. Dihembus-hembus semangat kapitalis yang mendunia pasca Perang Dingin, lalu manusia berani berpikir untuk mengambil resiko sendiri. Lalu berusaha ia untuk sukses, dengan banyak inovasi. Manusia lain ternyata juga berinovasi. Terjadilah kompetisi. Kompetisi menuntut inovasi. Begitu seterusnya. Dan inovasi berarti mendobrak kemapanan, dan banyak bukti menunjukkan orang-orang yang mendobrak kemapanan dan kekakuan struktur masyarakat semacam Bill Gates, Michael Dell, Jack Welch, justru sukses dan mengilhami banyak orang untuk mengikuti sukses. Orang akhirnya mengamini pendobrakan terhadap kemapanan, sekaligus merestui suasana yang semakin penuh perubahan.

Menjelang akhir milenium ketiga, banyak tanda-tanda perubahan yang sudah ditengarai. John Naisbitt dan Patricia Aburdene menyatakan akan ada sepuluh langkah baru yang akan menjadi trend tahun 1990-an berlanjut hingga tahun 2000-an. Sepuluh langkah ini merupakan perubahan besar terhadap apa yang diyakini sebelumnya, yaitu: ekonomi global, rennaisans seni, sosialisme pasar bebas, gaya hidup global, privatisasi "welfare state", kebangkitan tepi pasifik, era wanita dalam kepemimpinan, abad biologi, kebangkitan spritualitas, dan kejayaan individu.

Kejayaan individu? Menurut Naisbitt dan Aburdene, tema pemersatu yang besar di aband ke-20 adalah kemenangan individu. Belajar dari totalitarianisme sebelumnya yang ternyata tidak membawa kehidupan lebih baik seperti yang dijanjikan, manusia lebih memilih menjadikan tanggung jawab individu yang menjamin baik atau tidaknya kehidupan suatu orang. Hal ini didasarkan pada pepatah lama, bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan (Naisbitt, 1986: 281-282).

Sungguh, bahwa pada era global perubahan yang terjadi lebih banyak digerakkan oleh individu, bisa sendiri atau bersama-sama, bukan lagi organisasi kolektif. Individu bisa menentukan sikapnya sendiri, tidak bisa lagi diatur oleh kehendak organisasi. Dalam pemasaran, konsep *mass-marketing* sudah bergeser kepada *one-to-one marketing* (Ries, 2000: xii). Para pelaku bisnis, *frontliner* di era perubahan saat ini, mulai merasakan bahwa untuk bertahan hidup dan bertahan sukses harus bisa memahami pelanggan secara personal atau individu. Dengan demikian, para pebisnis itu bisa menjual barang dan jasa yang benar-benar dikehendaki oleh konsumen, sekaligus memengkan persaingan dengan kompetitornya.

Salah satu elemen era Perubahan adalah era Individu. Untuk bisa menyiasati era perubahan dan ketidakpastian yang ditimbulkannya, pemahaman manusia dalam sistem atau secara organisasi tidaklah cukup: kita perlu memahami manusia lebih dalam secara personal.

## **PERENCANAAN KOTA DI ERA PERUBAHAN**

Pada bagian awal disebutkan perubahan telah meliputi hampir semua aspek kehidupan manusia. Tulisan ini mencoba menyoroti perubahan dalam satu bidang, yaitu disiplin ilmu Perencanaan Kota. Sepanjang sejarahnya, bagaimana kota direncanakan dan dibentuk dapat dijelaskan dengan 3 teori normatif (Lynch, 1982: 73). Teori pertama disebut sebagai Teori Model Kosmis, kota dianggap representasi dari "Kerajaan Langit" yang ada di dunia. Kota dapat direncanakan dan dibentuk dengan *backup* kekuasaan Raja dan para pendeta lewat mitos-mitos yang diciptakan. Teori kedua disebut Teori Model Mesin, selayaknya kota-kota modern yang berparadigma rasional, progresif, efisien, sistemik, dan fungsional. Kota direncanakan dan dibentuk dengan dukungan kekuatan industri. Teori ketiga

disebut Toeri Model Organisma, kali ini mengambil analogi kapitalis yang menanamkan modalnya dan berharap tumbuh dan berkembang seperti sebuah pohon.

Dikaitkan dengan era perubahan dan era kejayaan individu, apa yang terjadi dengan praktek perencanaan kota? Jika di negara maju, yang relatif *civil society* sudah terbentuk, maka pertumbuhan kota relatif bisa terkendali. Individu bisa bersama-sama membangun tempat yang boleh dan mengkonservasi tempat yang dilarang. Namun yang terjadi di negara berkembang, seperti di Indonesia, individu-individunya belum bisa nyaman untuk saling berbagi dan mengalah, yang muncul adalah idiom “siapa cepat dia dapat”. Maka, sangat logis bila kemudian kota tidak tumbuh teratur dan terkendali sebagai sebuah organisma, namun tumbuh dan berkembang tak terkendali, menggerogoti bagian-bagian lain, seperti tak ubahnya sel-sel kanker.

Dalam sebuah seminar di ITB baru-baru lalu, Kemal Taruc secara eksplisit menyebut fenomena “Kegagalan Perencanaan” di era Perubahan, dengan konteks era pasca reformasi di Indonesia. Format-format RUTR, RTRW, RDTR, dan lainnya menjadi semacam “template” seragam yang diterapkan nasional dengan hanya dilakukan modifikasi dan penyesuaian data “statistik” di sana-sini. Dan para pengguna rencana ini –kalangan birokrasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas- menanggapi secara skeptis produk perencanaan kota model ini. Akhirnya produk-produk itu hanya menjadi setumpuk bundel laporan yang tersimpan rapi di dalam rak dan peta tata guna lahan yang terpajang di dinding (Taruc, 2004: 17-18). Apakah bisa dilaksanakan di lapangan, menjadi pertanyaan besar.

Kegagalan perencanaan, dalam konteks yang berbeda, juga terjadi di negara maju. Pruitt-Igoe Housing, di St. Louis, Amerika Serikat, dirancang dan dibangun tahun 1952-1955 dengan menggunakan konsep modern yang “ideal”, dengan 14 lantai elegan, penyediaan ruang terbuka untuk bermain, pemisahan dari pejalan kaki dan lalu lintas mobil, selayaknya sebuah “intelligent planning” yang menyajikan konsep “perilaku sehat”. Namun tahun 1977, bangunan ini hadir sebagai lingkungan yang tidak ditinggali, tempat vandalisme, dan banyak menimbulkan tindak kriminal. Pruitt-Igoe Housing, produk perencanaan yang dianggap cerdas, akhirnya berakhir tragis, didemolisi secara paksa.

Kisah kegagalan perencanaan di negara maju lain, Jepang, bisa dibagi di sini. Di negara ini, aturan-aturan diterapkan ketat, termasuk persyarat sebuah *neighbourhood unit*. Setiap *neighbourhood unit* secara konsisten mempunyai ruang terbuka/ taman yang mempunyai luas proporsional dan terletak pada jangkauan yang merata. Semua sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya, tidak semua taman hidup oleh aktivitas, terutama aktivitas anak sekolah. Ada taman yang luas dan dirancang baik, namun sering sepi, sementara taman yang relatif lebih sempit justru ramai. Apakah penyebabnya? Sebuah penelitian menyibakkan bukti, bahwa letak posisi taman yang menyebar merata tidak menjamin digunakannya taman oleh warga. Rata-rata anak-anak di Jepang mempunyai *mind-map* dari rumah ke sekolah, maka taman-taman yang mereka lewatilah yang mereka kenal, dan mereka nyaman bermain di situ. Sedangkan taman yang tidak pernah masuk dalam *mind-map* mereka, sebaik apa pun direncanakannya, tidak begitu mereka kenal, dan mereka enggan bermain-main di situ. Hal ini terjadi, karena pemerintah setempat ketika merencanakan taman lebih menerapkan standar, warga tidak sempat diajak bicara, dipahami apa mau mereka. Akibatnya, banyak taman yang benar secara teori, namun tidak sukses dinikmati masyarakat. Hal inilah yang mendorong pemerintah Jepang menjalankan perencanaan yang bersifat partisipatif sejak tahun 1980-an.<sup>1</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Dr. Roos Akbar ketika membuka seminar November lalu, bahwa terjadi perubahan paradigma dalam perencanaan, tahun 1960-an yang berciri saintifik dan tahun 1990-an yang bergeser ke arah keterlibatan dan partisipasi. Namun partisipasi, hasil evaluasi perencanaan di negara maju akan sangat

---

<sup>1</sup> Disarikan dari hasil Penelitian Dr. Agus Prabowo, sekarang Direktur SDA dan Lingkungan Bappenas.

berbeda dengan partisipasi di negara yang berkembang, karena kondisi masyarakat yang memang berbeda.

Namun ada benang merah atau kesamaan yang bisa ditarik di sini, bahwa pengambilan keputusan perencanaan tidak melulu memperhatikan faktor objektif dan rasional semata. Faktor kenyamanan orang dalam menerima perencanaan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan memegang peran yang sama pentingnya. Dan memahami orang, atau lebih luas masyarakat, tidak sesederhana yang dikira: seperti makna ungkapan “Dalam laut (alam) dapat diduga, dalam hati (manusia) siapa yang tahu”. Maka konsepsi pemahaman terhadap manusia dan masyarakat negara maju tidak serta merta bisa digunakan untuk memahami masyarakat negara berkembang, termasuk Indonesia.

## **SENJAKALA MODERNISME DAN PERGESERAN PARADIGMA DALAM PERENCANAAN KOTA**

Dihancurkannya Pruitt-Igoe Housing dijadikan simbol “kematian Arsitektur Modern”. Modernisme, beserta konstruk-konstruk yang dilahirkannya termasuk konstruk dalam perencanaan kota, telah menuai banyak kecaman karena kegagalannya membawa kehidupan yang lebih baik seperti yang dicanangkan pada awalnya. Kalau pun toh belum bisa disebut mati, Modernisme telah memasuki masa senjakala. Gegap gempita rasionalitas akhirnya menjadikan kota seperti mesin, dan menghilangkan aspek manusiawinya.

Dalam perencanaan kota modern, adalah Constantinos Dioxiadis, yang berupaya menjadikan ilmu merencanakan lingkungan binaan sebagai ilmu sains selaras dengan semangat peradaban Modernisme. Dioxiadis sempat menerapkan teorinya pada ibukota Pakistan, “Islamabad”. Meskipun bernama “Kota Islam”, secara arsitektur kota ini lebih memperlihatkan semangat modern ketimbang visi keislaman dalam lingkungan binaan. Struktur kota yang berbentuk grid, pembagian peruntukan yang sangat tegas, jalan-jalan dirancang lurus, serta bangunan-bangunan yang tampak sama dan tanpa nama. Betapapun, nama “Kota Islam” ternyata tidak menyentuh makna masyarakat Islam. Akbar S. Akhmed menyebutkan, kota rancangan Dioxiadis ini justru lebih menonjolkan modernisme ketimbang kebesaran visi keislaman: jalan-jalan lurus dan kaku, bangunan tanpa identitas, dan bentuk melulu mengikuti fungsi.<sup>2</sup>

Gugatan terhadap perencanaan kota ala modernisme memang beriring dengan gugatan terhadap modernisme. Modernisme cenderung melihat masalah secara positivistik, memisahkan pengamat dari objek yang diamati. Pendekatan ini sukses diterapkan di ilmu-ilmu alam, yang kemudian berhasil melahirkan inovasi rekayasa alam dan teknologi mutakhir. Namun ketika hendak mengikuti pendekatan ilmu alam, positivistik justru banyak gagal di ilmu-ilmu sosial, karena gagal melihat masalah yang sebenarnya. Pendekatan positivistik akhirnya lebih pada pemaknaan (atau pemaksaan?) teoretis terhadap fenomena kemanusiaan dan kemasyarakatan. Sebagai misal, ilmu psikologi modern adalah ilmu tentang jiwa manusia, sanggup menganalisis gejala jiwa, tetapi gagal untuk memahami apa sebenarnya jiwa itu.

Lalu, kegagalan perencanaan ala modernisme apakah berasal dari pemisahan pengamat dari objek yang diamati (atau yang direncanakan)? Mari kita simak, bagaimana Dioxiadis men-saintifik-kan lingkungan binaan. Ia memulai dengan “Manusia”, kemudian meluas ke “masyarakat”, “jaringan”, “alam”, dan kaitannya dengan aktivitas bertempat tinggal manusia. Untuk menjelaskannya, beragam model dibuat oleh Dioxiadis, hingga akhirnya terbangunlah teorinya. Sebenarnya, Dioxiadis sama sekali tidak mengesampingkan manusia:

---

<sup>2</sup> Akbar S. Ahmed. *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*. Mizan. 1992. Hlm. 210.

ia justru ingin memahami manusia. Namun sesuai tradisi modernisme, ia memahami dengan membuat model.

Penulis mencoba melempar dugaan, bahwa kesalahannya adalah bukan dari bagaimana membuat model untuk menjelaskan realitas (manusia), namun anggapan bahwa model adalah realitas (manusia) itu sendiri. Maka kegagalan perencanaan kota di Indonesia bisa diturunkan dari dugaan itu, bahwa perencanaan lebih sibuk dengan urusan model, berupa perangkat, aturan, standar, dan melupakan hakikat dari perencanaan kota: manusia dan lingkungan binaannya.

## **ASPEK HUMAN RELATION DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERENCANAAN KOTA : EMPATI UNTUK MEMAHAMI MANUSIA**

Riset yang dilakukan oleh Daniel Goleman terhadap sejumlah alumni MIT yang sukses ternyata mencengangkan banyak kalangan. Setelah sekian tahun lepas sekolah, ternyata lebih banyak alumni MIT yang sukses adalah mereka yang memiliki kecerdasan emosional (EQ) yang tinggi, lebih dari mereka yang mempunyai kecerdasan intelektual (IQ) tinggi, yang selama ini dijadikan parameter menilai kapasitas seseorang. Ternyata Goleman menyodorkan bukti bahwa kecakapan dalam membuat orang nyaman bekerja bersama dia lebih mendukung kesuksesan daripada membuat pekerjaan yang bagus secara objektif.

Kecerdasan emosional secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai kemampuan untuk memahami orang lain secara mendalam. Dalam tradisi sufi, dikenal ungkapan “aku merasakan apa yang kau ketahui”, yang memiliki ketinggian ilmu lebih daripada “aku mengetahui apa yang engkau rasakan”. Merasakan apa yang orang lain rasakan disebut empati. Selanjutnya menurut Goleman, empati ini berperan untuk menangkap isyarat ungkapan isi hati orang lain, yang tidak selalu dinyatakan secara verbal.

Lalu, apa kaitannya dengan proses pengambilan keputusan perencanaan kota? Jika kita merencanakan sesuatu untuk diri kita sendiri, dan kita memutuskan untuk melaksanakan rencana itu betapapun itu membuat kita sulit, kita akan menjalankannya dengan motivasi bahwa rencana itu akan menjadikan kita lebih baik. Namun manakala kita membuat rencana yang akan dilaksanakan oleh pihak lain, maka tidak ada jaminan pihak lain itu akan melaksanakan rencana yang kita buat, sebagus apapun rencana itu, jika mereka tidak menganggap rencana itu signifikan atau membuat kehidupan mereka lebih baik, apa lagi rencana itu akan banyak menyulitkan atau merepotkan mereka.

Maka di era perubahan, ketika Individu menjadi semakin penting, penolakan terhadap rencana kota karena dianggap tidak menyelesaikan masalah menjadi sangat mungkin terjadi. Penolakan yang paling halus adalah dengan tidak melaksanakannya. Maka, sebagus apapun pemikiran tentang kondisi ideal yang dicita-citakan, hanya akan menjadi tumpukan kertas tak berarti, jika si pelaksana rencana itu tidak ada keinginan untuk melaksanakannya.

Di era perubahan ini, semakin nisbinya kekuatan sistem untuk mengendalikan manusia, semakin diperlukan pendekatan *human relation* jika ingin suatu rencana atau gagasan direalisasikan. Human relation dipahami sebagai upaya untuk memberikan perhatian kepada manusia, bukan sekadar produk yang dihasilkan. Memasukkan unsur *human relation* dalam proses perencanaan memang tidak akan menghasilkan pola yang tidak linier, keputusan tidak semata-mata diturunkan dari angka-angka. Keputusan harus bisa diterima oleh semua pihak, yang bisa duduk satu meja dengan kepala dan hati terbuka. Maka bukan hanya otak yang bekerja di sini, melainkan hati juga.

## ASPEK HUMAN RELATION DAN PERENCANAAN KOTA DI INDONESIA

Perencanaan sebenarnya proses untuk membuat gambaran mengenai keadaan yang lebih baik yang dicita-citakan, dan langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai cita-cita itu. Jika perencanaan itu dilaksanakan oleh pihak lain, maka tak ubahnya seperti proses menjual gagasan. Dan belajar dari ilmu pemasaran mengenai cara menjual gagasan yang sukses adalah “understand before you will be understood”. Pahami orang lain, jika kamu ingin dipahami. Setelah sama-sama saling memahami, *restrain* bisa dicairkan, maka relatif lebih mudah untuk menjual gagasan, dan orang itu dengan senang hati akan mengimplementasikan gagasan kita itu.

Di Indonesia, proses implementasi perencanaan kota sepertinya berada pada tahap yang berbeda dengan apa yang terjadi di negara maju. Jika di negara maju tahun 1980-an perencanaan kota sudah berhasil dilaksanakan, namun banyak yang gagal untuk berjalan sesuai yang diharapkan (dinikmati masyarakat secara optimal). Maka pendekatan partisipatif dijalankan, agar apa yang dimau pengguna bisa diwadahi ketika proses perencanaan berlangsung. Di Indonesia, tahun 1990-an, produk perencanaan kota banyak yang belum bisa diimplementasikan. Justru masalahnya, bagaimana membuat produk-produk perencanaan itu bisa dilaksanakan.

Perencanaan pada domain publik, tentulah melibatkan kalangan birokrasi sebagai aktor kunci, karena merekalah yang akan melaksanakan perencanaan ini di lapangan. Namun di era transformasi di Indonesia saat ini, terutama setelah ditetapkannya UU otonomi daerah, SDM birokrasi kita terutama di daerah, masih menunjukkan kapasitas yang minim. Lalu efektifkan membuat rencana yang “ideal”, berdasarkan teori-teori akademis, namun berhadapan dengan resiko bahwa yang akan menjalankan perencanaan ini tidak memahami maksudnya?

Tulisan ini mencoba menawarkan gagasan, bagaimana memasukkan unsur manusia pelaksana perencanaan itu menjadi faktor penentu pengambilan keputusan mengenai perencanaan. Jika pelaksana itu berkarakter *powerfull* (*show of force*, menekankan ketundukan pada loyalitas terhadapnya), maka rencana itu diposisikan merendah (*andhap ashor*), namun berisi kalimat-kalimat halus yang bersifat mengingatkan akan resiko-resiko terhadap kepentingan yang dititipkannya dan keputusan yang akan diambil. Jika pelaksananya berkarakter visioner, perencanaan ditempatkan sebagai referensi atau sandaran argumentasi jika ia akan melangkah lebih jauh. Jika karakter pelaksana itu adalah “pasrah”, hanya menjalankan perintah atasan, maka perencanaan ini diposisikan sebagai media untuk menyemangati, dan menggerakkan untuk berbuat dan berpikir lebih. Lalu bagaimana jika pelaksana perencanaan kota itu campuran orang-orang *powerfull*, visioner, dan pasrah? Silakan bermain, bukankan kita adalah “Homo Ludens” (makhluk yang bermain)?

Bisa jadi, dalam masa transisi di negeri ini, produk perencanaan menjadi tidak terlalu signifikan, karena bisa berubah akibat kebijakan politik yang masih bisa berganti setiap saat. Apalagi untuk diimplementasikan secara utuh. Proses bisa jadi menjadi lebih menarik, di mana antara kalangan ahli dan profesional bisa saling belajar bersama, antara konsep-konsep umum yang bisa dipertanggungjawabkan dari para ahli dan masalah-masalah faktual di lapangan yang harus diselesaikan para *stakeholders*. Dan proses perencanaan kota menjadi proses **edukasi** mengenai bagaimana merencanakan dan mengelola sebuah kota, yang harmoni antara hal yang konseptual dan hal aktual. Belajar dari dunia marketing, jika konsumen belum bisa menerima produk kita karena belum memahami manfaat baginya, maka lancarkanlah strategi edukasi, hingga konsumen benar-benar paham bahwa barang atau jasa ini benar-benar bermanfaat untuknya.

Masa transisi juga masih menyisakan potensi konflik kepentingan, bahkan bisa jadi ada di dalam tubuh birokrasi sendiri. Jika ini terjadi, akan terjadi tarik ulur kepentingan dalam

pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang harus dimasukkan dan diprioritaskan dalam rencana yang disusun. Jika proses tarik-menarik kepentingan ini begitu kuatnya, proses akan mengalami stagnasi ( $resultante = 0$ ). Jika kondisi ini yang terjadi, maka menjadi peluang dari perencana, dengan kemampuan berpikir objektif, untuk bertindak menjadi penengah konflik. Tentu dengan pendekatan *human relation* yang baik, perencanaan kota bisa menjadi sarana **mediasi** bagi para stakeholders.

Belajar dari para pendahulu di negeri ini, ketika banyak tradisi diajarkan dengan cara informal, pendekatan secara manusiawi. Belajar dari Sunan Kalijaga yang senantiasa “nguwongake” (memanusiakan), merogoh hati orang yang akan diajaknya memeluk agama Islam, akhirnya pandangan-pandangan Sang Sunan relatif bisa diterima oleh masyarakat, meskipun berasal dari luar daerah, nyaris tanpa penolakan atau gesekan. Ketika kita ingin menjadikan perencanaan kota sebagai sarana **edukasi** dan **mediasi** bagi masyarakat, termasuk kalangan birokrasi, maka seminar-seminar formal menjadi kurang menggigit, dan jauh lebih efektif jika tukar gagasan itu disampaikan lewat pembicaraan-pembicaraan informal, santai, dari hati ke hati, agar timbul rasa saling percaya. Maka yang dibutuhkan bukan sekadar *stakeholders mapping* yang masih berorientasi kepada lembaga, tetapi juga *key-actors understanding*, memahami mereka yang berperan, sebagai manusia pribadi yang punya mau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Branch, Melville C.. *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995.
- Catanese, Anthony J. dan Snyder, James C. (Ed). *Urban Planning*. New York: McGraw Hill Book Company. 1979.
- Doxiadis, Constantinos A. *Ekistic: an Introduction to the Science of Human Settlements*. London: . 1968.
- Drucker, Peter F.. *Managing in a time of Great Change*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 1995
- Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosional): Mengapa EI lebih penting daripada IQ*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Hodgetts, Richard M. *Modern Human Relation at Work*. Dryden Press.
- Jencks, Charles. *The Language of Post Modern Architecture*. London: Academy Editions. 1977.
- Lynch, Kevin. *A Theory Of Good City Forms*. Cambridge: MIT Press. 1982.
- Naisbitt, John, dan Aburdene, Patricia. *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk tahun 1990-an*. Jakarta: Binarupa Aksara. 1986.
- Ries, Al, dan Ries, Laura. *The Fall of Advertising and the Rise of Public Relation*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Sudradjat, Iwan. “Penelitian Kuantitatif Vs. Kualitatif”. Materi Kuliah *Metodologi Penelitian Arsitektur*. Semester 1 20002/2003.
- Taruc, Kemal. “Perencanaan di Indonesia: Sebuah Catatan di tahun 2004”. Makalah disajikan dalam Seminar *Peran Perencanaan dalam Proses Perumusan Kebijakan di Era Pasca Transformasi*. Bandung: Departemen Teknik Planologi ITB dan Bappenas. 2004